



Menjawab Krisis Sampah dengan Kemandirian Warga



DAERAH Istimewa Yogyakarta kembali menghadapi krisis sampah yang tak kunjung selesai. TPA Piyungan, satu-satunya tempat pengolahan akhir bagi wilayah Kartamantul (Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul), nyaris lumpuh. Kuota pembuangan tinggal 2.400 ton hingga akhir tahun dengan Kota Yogyakarta sebagai prioritas. Sleman dan Bantul dipaksa mencari solusi sendiri. Aroma tak sedap, tumpukan sampah di depo, dan spanduk protes warga menjadi pemandangan harian yang memalukan.

Di tengah kegaduhan itu, pemerintah daerah mulai bergerak. Pemda DIY menyerukan agar setiap OPD mengelola sampahnya secara mandiri. Pemkot Yogyakarta meluncurkan program iembrisasi dan pengangkutan langsung oleh penggerak. Langkah-langkah ini patut diapresiasi, tetapi belum menyentuh akar persoalan: perubahan perilaku dan partisipasi warga.

Justru dari lapisan masyarakat bawah, harapan itu muncul. Beberapa kelompok masyarakat berinisiatif mengelola sampah di lingkungannya secara mandiri. Salah satunya Kelompok Alam Lestari Mandiri (ALDI) di RW 53 Sambilegi, yang berlokasi di Padukuhan Sambilegi Lor, Kalurahan Maguwoharjo, Sleman. Kelompok ini telah membuktikan bahwa pengelolaan sampah mandiri dapat diwujudkan secara nyata melalui penerapan sistem yang sederhana namun efisien. Mereka memilah sampah kertas dan plastik lalu menjualnya ke pengepul. Hasil penjualan digunakan untuk menutupi biaya operasional, termasuk honor petugas pengambil sampah. Setiap hari petugas menyisir rumah-rumah warga, mengangkut sampah langsung dari depan pintu. Hasilnya adalah terciptanya lingkungan yang higienis, sehat, serta nyaman.

Sampah yang terkumpul tidak langsung dibuang ke TPA. Di tempat pengolahan, sampah akan dipilah menjadi tiga kategori: organik, anorganik, dan

Dr Moch Hamied Wijaya

residu. Sampah organik dimanfaatkan sebagai bahan kompos, sementara plastik dan kertas koran dijual kembali. Adapun sisa residu yang tidak dapat diolah dialirkan ke TPA. Dari total sekitar 150 kepala keluarga, volume sampah harian mencapai 300 kg. Hanya 40 kg (sekitar 14%) yang berakhir di TPA, sehingga 86% sampah berhasil ditangani secara mandiri di tingkat RW.

Pendekatan yang menjadi ciri khas mereka adalah sifatnya yang edukatif,

tidak selalu bersumber dari kebijakan tingkat atas; sering kali muncul dari masyarakat akar rumput yang peduli akan lingkungan tempat keluarganya tumbuh, dan menolak hidup dalam bayang-bayang bau sampah.

Krisis sampah DIY bukan hanya soal volume, tetapi soal visi. Dan visi itu sedang diperlihatkan oleh warga RW 53 Sambilegi. Kini saatnya kita berhenti bicara, dan mulai meniru.

Sayangnya, inisiatif seperti ini masih berjalan sendiri. Pemda belum menjadikannya mitra strategis. Padahal, jika DIY ingin keluar dari krisis, maka langkah-langkah berikut segera dilakukan: a) Pertama, integrasikan kebijakan dengan komunitas. Jangan biarkan program pemerintah berjalan paralel tanpa menyentuh gerakan warga. b) Kedua, berikan dukungan dan anggaran (bila dibutuhkan) dan insentif bagi kelompok swadaya. c) Ketiga, masukkan pendidikan lingkungan berbasis lokal ke dalam kurikulum sekolah dan kegiatan ke-lurahan. d) Keempat, bangun sistem desentralisasi pengolahan sampah di tingkat RW atau padukuhan.

Krisis sampah bukan hanya soal volume, tapi soal visi. Kita perlu bergeser dari pola buang ke pola olah. Dari ketergantungan ke kemandirian. ALDI Sambilegi telah membuktikan bahwa perubahan itu mungkin.

Karena pada akhirnya, pengelolaan sampah bukan hanya soal kebersihan, tetapi soal martabat kota dan tanggung jawab generasi. (*)-d

***)Dr Moch Hamied Wijaya MM,**
Dosen FES Universitas Amikom Yogyakarta.



KR-JOKO SANTOSO

melibatkan partisipasi aktif warga, dan dijalankan secara konsisten. Warga dilibatkan, diberi pemahaman, dan diajak bertanggungjawab. Tidak ada paksaan, hanya kesadaran bersama.

Memang, skala mereka masih kecil dibandingkan dengan besarnya masalah sampah di DIY. Tapi bayangkan jika model ini diduplikasi di ribuan RW lain. Jika setiap RW mampu mengurangi 85% sampah yang dikirim ke TPA, maka beban Piyungan akan berkurang drastis. Kita tidak lagi bicara tentang darurat, tetapi tentang transformasi.

Alih-alih hanya mendiskusikan wacana tentang penanganan sampah, pemerintah perlu belajar dari inisiatif lokal yang nyata. Berikan dukungan, bantu kekurangan yang dibutuhkan dan jadikan komunitas pengelolaan sampah sebagai mitra strategis. Solusi

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengap mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa melampirkan fotocopy identitas dan foto diri. Terimakasih.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005